

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENYETARAAN D-II PGSD FKIP UNIVERSITAS TERBUKA SURABAYA

Oleh:

*Dwi Sambada (Staf Pengajar FKIP UT)
dan Zuchdi (Staf Pengajar FIS UNY)*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan PPD-II PGSD ditinjau dari komponen: kurikulum; mahasiswa; tutor dan supervisor; organisasi dan mekanisme pengelolaan program; sarana dan prasarana tutorial; lingkungan tutorial; proses pembimbingan PKM; dan prestasi belajar mahasiswa. Pendekatan dan model evaluasi menggunakan pendekatan proses dan model CIPP.

Sumber informasi diperoleh dari pengelola program, tutor, supervisor PKM, dan mahasiswa PPD-II PGSD di Kabupaten Jombang. Pengumpulan data menggunakan instrumen angket, didukung wawancara terstruktur dan dokumentasi. Validitas instrumen diperoleh melalui validasi instrumen dan uji coba instrumen. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan distribusi frekuensi dan persentase, selanjutnya diinterpretasi dan dibahas secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan masih adanya kendala di antaranya kemampuan tutor dalam menjabarkan isi kurikulum serta penuntasan materi modul; distribusi sarana dan prasarana belajar; intensitas dan efektivitas tutorial; keterbatasan KIT IPA; penataan lingkungan sosial-psikologis; prestasi belajar mahasiswa belum mencapai kualitas baik. Minat mahasiswa, tutor, mekanisme pengelolaan program, dan PKM sudah baik.

Kata Kunci: evaluasi, program penyetaraan, universitas terbuka

Pendahuluan

Penyelenggaraan pendidikan nasional berfungsi sebagai upaya sistemik dan sistematis untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional (UUSPN No.2, 1998, Pasal 3). Untuk meningkatkan pembangunan pendidikan perlu diupayakan antara lain dengan melakukan berbagai bentuk inovasi pendidikan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kualitas, efektivitas

dan efisiensi serta relevansi perlu dijadikan pertimbangan di dalam menetapkan suatu bentuk kebijakan pendidikan.

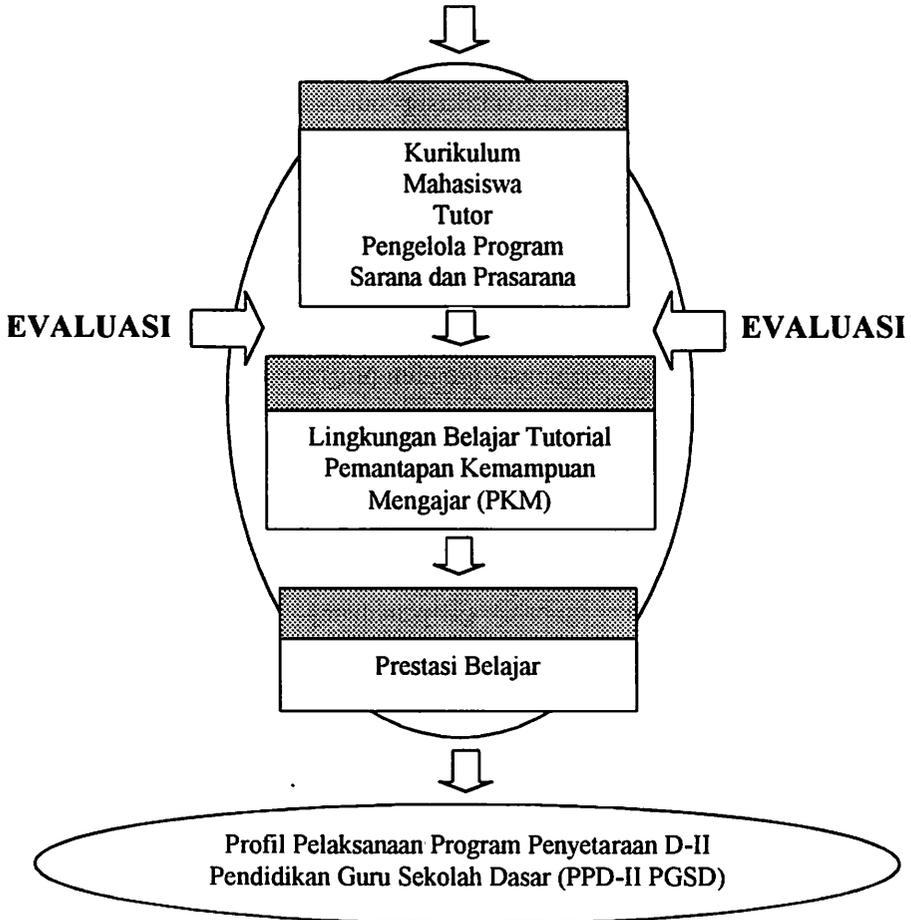
Program Penyetaraan D-II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PPD-II PGSD) merupakan salah satu inovasi pendidikan diselenggarakan atas kerja sama Dirjen Dikdasmen dengan FKIP Universitas Terbuka (UT) diperuntukkan khusus bagi mereka yang sudah bekerja sebagai guru SD. Menurut Studi Konsorsium Ilmu Pendidikan (1992), bahwa rata-rata kualifikasi pendidikan guru pada saat ini perlu ditingkatkan jika pemerintah ingin memacu kualitas. Kalau persyaratan minimal adalah D-II untuk guru SD, D-III untuk guru SLTP, dan S1 untuk guru SLTA, ternyata sebagian besar guru masih tergolong berkualifikasi kurang (*under qualified*). Berkaitan dengan itu maka penyelenggaraan PPD-II PGSD perlu lebih ditingkatkan pelaksanaannya agar semua guru SD di Indonesia dapat memenuhi persyaratan pendidikan minimal yang ditetapkan, baik yang melalui biaya pemerintah (proyek) maupun dengan biaya sendiri (swadana).

Seperti halnya penyelenggaraan program-program pendidikan yang lain, PPD-II PGSD ini juga dilakukan melalui tahapan: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang memadai sehingga tujuan dan sasaran dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu, sebelumnya dilakukan persiapan-persiapan antara lain: 1) pengembangan kurikulum SD; 2) program penataran, baik bagi dosen/tutor maupun tenaga administratif; 3) program penataran bagi dosen/tutor yang berasal dari dosen UT; 4) penulisan dan pengembangan bahan ajar/modul; dan 5) pengembangan bahan ajar pendukung.

Penyelenggaraan PPD-II PGSD UT telah dimulai sejak tahun akademik 1990/1991. Dengan demikian, program ini telah berlangsung lebih kurang 10 tahun. Selama kurun waktu relatif lama ini, berbagai kendala, masalah dan keberhasilan penyelenggaraan PPD-II PGSD tampaknya belum banyak dievaluasi, apalagi evaluasi yang bersifat menyeluruh dengan melibatkan seluruh komponen penyelenggaraannya sehingga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraannya pun belum banyak diperoleh informasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya di dalam penelitian ini akan dievaluasi berbagai komponen yang dipandang mengontribusi dan atau menjadi kendala dalam penyelenggaraan PPD-II PGSD FKIP UT selama ini, khususnya penyelenggaraan PPD-II di Kabupaten Jombang. Secara umum permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini adalah "profil pelaksanaan PPD-II PGSD, khususnya di wilayah Kabupaten Jombang". Secara diagramatik batasan atau peta permasalahan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.

Evaluasi Pelaksanaan Program Penyetaraan D-II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PPD-II PGSD) FKIP Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya



Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi, mengkaji, dan mendeskripsikan penyelenggaraan PPD-II PGSD di daerah, khususnya di Kabupaten Jombang. Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi:

a. Tahap Masukan: 1) implementasi kurikulum PPD-II PGSD di Lapangan; dan 2) minat dan sikap mahasiswa terhadap profesi guru, serta minat dan motivasi mahasiswa mengikuti program; 3) kualifikasi dan latar belakang pendidikan tutor serta relevansi pendidikan tutor; 4) kejelasan deskripsi dan pembagian tugas para pengelola daerah/pokjar; 5) ketersediaan dan efektivitas sarana dan prasarana di dalam menunjang misi dan tujuan tutorial.

b. Tahap Proses: 1) pelaksanaan tugas pengelola daerah; 2) intensitas dan efektivitas tutorial; 3) penciptaan lingkungan tutorial yang kondusif; 4) intensitas dan efektivitas proses pembimbingan latihan Praktik Kegiatan Mengajar (PKM) mahasiswa.

c. Tahap hasil: prestasi belajar mahasiswa dilihat dari Indeks Prestasi Kumulatif.

Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini, pendekatan dan model evaluasi program yang digunakan adalah *pendekatan proses* dengan model CIPP. Hasan (1988) mengatakan bahwa sesuai dengan namanya pendekatan proses ini mengembangkan kriteria selama proses evaluasi berlangsung. Kriteria didapat melalui wawancara, observasi atau studi dokumentasi. Pendekatan ini berhubungan erat dengan aplikasi pendekatan kualitatif. Karakteristik yang menonjol pada pendekatan ini adalah kriteria yang digunakan dikembangkan selama evaluator di lapangan. Model CIPP yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam dkk. (1967) di Ohio State University (Arikunto, 1991) merupakan sebuah akronim dari *Context Evaluation* (penilaian tentang konteks), *Input Evaluation* (Penilaian tentang masukan), *Process Evaluation* (penilaian tentang proses), dan *Product Evaluation* (penilaian tentang hasil). Hasan (1988) menyatakan bahwa evaluasi model CIPP cenderung lebih menitikberatkan peran formatif, yaitu informasi hasil evaluasinya tidak ditujukan untuk menggantikan program, melainkan untuk menyeleksi dan memberikan pertimbangan mengenai apakah ada komponen program yang perlu diperbaiki.

Populasi penelitian adalah seluruh unsur pelaksana program PPD-II PGSD di Kabupaten Jombang terdiri dari: (1) pengelola program; (2) tutor; (3) dosen pembimbing/supervisor PKM; (4) mahasiswa yang telah menyelesaikan semester I dan II; dan (5) mahasiswa peserta PKM. Pengambilan sampel penelitian jumlahnya tidak sama (tidak proporsional). Hal ini disebabkan oleh

unit analisisnya adalah kelompok yang terdiri dari unsur pelaksana dan sasaran program yang berbeda, data, pengolahan, analisis data, serta simpulan penelitian tidak digeneralisasikan untuk seluruh kelompok populasi, tetapi hanya diberlakukan bagi tiap-tiap kelompok populasi sesuai dengan komponen program yang dievaluasi.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui angket, wawancara, dan dokumentasi yang sebelumnya dilakukan observasi di lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan wujud distribusi frekuensi dan persentase terhadap setiap alternatif jawaban yang diberikan.

Pembahasan

1. Komponen Masukan Program

Munculnya berbagai kesulitan yang dihadapi tutor ataupun mahasiswa dalam melaksanakan kurikulum PPD-II PGSD 1996, tidak berarti bahwa kurikulum tersebut kurang baik atau tidak aplikatif, misalnya penambahan jumlah mata kuliah praktik/praktikum dari 5 menjadi 10 mata kuliah juga banyak dirasakan oleh tutor dan mahasiswa lebih memberikan bobot pada struktur mata kuliah dalam kurikulum PPD-II PGSD yang baru sehingga secara substantif dipandang sangat relevan untuk tingkat Diploma II dan sarat dengan muatan ke-SD-an, tetapi di lain pihak hal itu memberikan beban tersendiri bagi tutor ataupun mahasiswa.

Sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesulitan para tutor untuk melakukan penafsiran dan penjabaran isi kurikulum/GBPP, baik dalam bentuk RAT/MAT maupun program semester antara lain disebabkan : (1) para tutor kurang memiliki pengetahuan, wawasan, dan nuansa ke-SD-an; (2) intensitas pembekalan materi dalam penataran tutor daerah yang berkaitan dengan pengetahuan, wawasan dan nuansa ke-SD-an perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius; (3) sulitnya mendapatkan sumber pustaka yang relevan; (4) tidak relevannya kualifikasi pendidikan tutor dengan mata kuliah yang diampu; (5) ketersediaan bahan ajar yang kadang-kadang terlambat.

Adalah suatu hal yang ironis bahwa substansi kurikulum PPD-II PGSD 1996 yang dipandang sangat relevan untuk tingkat D-II dan sarat dengan muatan ke-SD-an (Universitas Terbuka, 1997a) ternyata oleh sebagian besar mahasiswa dirasakan adanya kesulitan untuk memahaminya. Berdasarkan data yang diperoleh tampaknya tidak bersumber dari substansi dan sekuensi kurikulum PPD-II PGSD 1996 itu sendiri, tetapi lebih disebabkan oleh: (1) tingkat kepemilikan pengetahuan dan kemampuan belajar mandiri yang sangat

kurang; seperti pernah juga dilaporkan oleh Damajanti (Belawati, 1997), Baharuddin (1992), Farisi (1985); (2) dominasi peran dan aktivitas tutor dalam tutorial masih cukup tinggi; (3) mahasiswa belum memiliki kemampuan melakukan transformasi pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai guru SD ke dalam pengetahuan kurikuler yang terdapat pada sebagian besar mata kuliah di dalam PPD-II PGSD.

Penerapan sistem kombinasi antara belajar mandiri dengan pertemuan tatap muka terjadwal seminggu sekali, untuk mengakomodasi antara kewajiban mahasiswa untuk tetap melaksanakan tugas pokoknya yaitu mengajar, tetapi pada saat yang bersamaan yang bersangkutan harus dapat belajar/melanjutkan studi, di satu pihak memang cukup rasional; tetapi tampak beratnya beban tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi mahasiswa bagi kepentingan tugas kedinasannya di sekolah, tidak sepenuhnya memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi mahasiswa untuk berkonsentrasi penuh terhadap kelanjutan studinya dalam PPD-II PGSD sehingga pada sebagian mahasiswa muncul kekhawatiran untuk tidak dapat melaksanakan tugas-tugas ke-SD-annya dengan baik.

Tutor dan Supervisor PKM belum seluruhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terutama relevansi latar belakang bidang studi mereka dengan mata kuliah yang diampu dalam PPD-II PGSD. Persoalan tersebut muncul dan menimbulkan implikasi terhadap pelaksanaan program, yang tampaknya tidak disebabkan oleh kesalahan dalam proses rekrutmen tenaga tutor dan supervisor; namun lebih disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang ada di daerah.

Perbedaan persepsi dan pengalaman antara tutor serta supervisor yang berasal dari guru SLTP/SLTA dengan para pengawas TK/SD tersebut ternyata berimplikasi jauh terhadap persepsi keduanya dalam hal pelaksanaan bimbingan PKM. Munculnya sejumlah perbedaan dalam penyusunan rumusan TIK/TPK, dan penyusunan KBM, serta pengembangan alat evaluasi merupakan suatu hal yang wajar dan logis walaupun akhirnya para mahasiswa yang harus menyikapi secara arif adanya keberbedaan tersebut.

Mahasiswa, persoalan prestasi, dedikasi, lama mengajar, minat, dan motivasi yang diisyaratkan oleh pemberi beasiswa (Depdiknas Wilayah) tidak sepenuhnya dapat dipenuhi. Faktor-faktor seperti usia, jenjang kependidikan, dan kendala keluarga sering menjadi *intervening variables* dalam proses rekrutmen mahasiswa. Menghadapi kondisi yang demikian itu adalah hal yang

wajar apabila para pengelola di daerah harus merekrut mahasiswa yang tidak seluruhnya *qualified*.

Persoalan lain muncul berkaitan dengan kondisi mahasiswa PPD-II PGSD, yaitu keawaman mereka tentang Sistem Pendidikan Jarak Jauh (SPJJ) dan cara belajar mandiri. Kondisi yang demikian itu juga terdapat pada tenaga tutor dan supervisor. Penelitian ini menemukan fakta bahwa aktivitas mahasiswa untuk mempelajari modul sebelum dan sesudah tutorial secara mandiri: menyelesaikan tugas-tugas kurikuler dan ko-kurikuler yang diberikan tutor, serta pengajuan pertanyaan atau masalah yang ditemukan pada saat mereka belajar mandiri (individual atau kelompok) kepada tutor selama tutorial masih cukup rendah.

Sebagaimana juga dilaporkan oleh Saripudin (1998) dan Wardani (1995), terbukti bahwa mahasiswa PPD-II PGSD yang notabene juga seorang guru SD memiliki minat, kebiasaan, dan sikap belajar (membaca) yang sangat terbatas. Sehubungan dengan hal itu, pengakuan bahwa mahasiswa PPD-II PGSD memiliki motivasi berprestasi sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini masih menimbulkan “pertanyaan”, apalagi prestasi belajar yang diperoleh mahasiswa hingga semester IV tidak mendukung pengakuan tersebut.

Sarana dan Prasarana Belajar sebagai komponen masukan PPD-II PGSD tampaknya juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen ini merupakan komponen terlemah dibandingkan dengan komponen program yang lain, Penerapan SPJJ dan belajar mandiri dalam PPD-II PGSD mustahil dapat terselenggara dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal manakala sarana dan prasarana pembelajaran, terutama modul yang sesuai dengan jumlah mahasiswa, serta alat-alat praktikum (KIT IPA), bahan-bahan praktik lainnya yang siap digunakan untuk mendukung terciptanya iklim tutorial yang aktif, interaktif, dan kondusif juga belum tersedia dengan jumlah memadai, serta waktu pengiriman yang sangat terlambat.

Adalah suatu hal yang mustahil dalam konteks SBJJ dan belajar mandiri, aktivitas belajar dan pembelajaran dapat terjadi dengan hasil yang maksimal apabila sarana pokok yang dibutuhkan tidak rasional dan tidak tepat waktu pendistribusiannya. Apalagi hingga kini UT masih menempatkan bahan belajar cetak dalam bentuk modul sebagai bahan belajar utama mahasiswa, yang sengaja dipilih karena berpotensi menjamin materi yang terstandarisasi (Universitas Terbuka, 2000b).

2. Komponen Proses Program

Komponen Program, penerapan mekanisme pengelolaan program yang bersifat sentralistik dan baku dari UT pusat untuk kepentingan standarisasi dan kendali mutu pelaksanaan hasil program, di satu pihak merupakan konsekuensi logis dari teoretis dan praktis SBJJ. Di lain pihak dampak pengiring yang ditimbulkan terutama sekali berkaitan dengan munculnya berbagai keluhan dari mahasiswa dan para pengelola pokjar, yang menyatakan bahwa prosedur dan proses penyelesaian kasus-kasus yang dialami oleh mahasiswa PPD-II PGSD, menjadi sangat berbelit-belit dan birokratis sehingga dirasakan tidak efektif, dan secara psikologis membebani mahasiswa dan para pengelola. Akibat kasus-kasus tersebut tidak terealisasi secara tuntas maka banyak yang menjadi korban, karena tidak bisa lulus tepat waktu. Ketidakefektifan penyelesaian kasus tersebut disebabkan oleh sistem sentralisasi administrasi PPD-II PGSD di UT pusat, di samping ketidakcermatan mahasiswa sendiri.

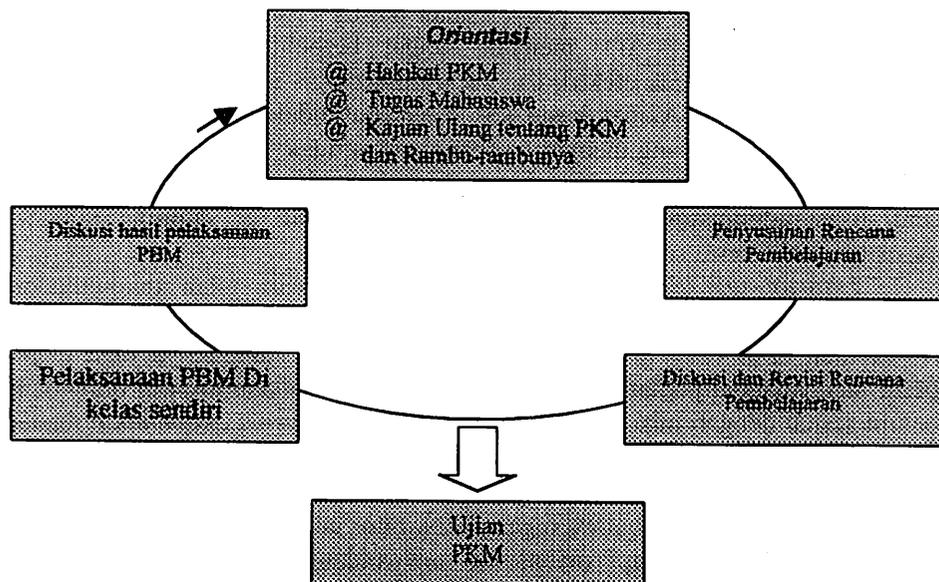
Tutorial dan Penciptaan Kondisi Pembelajaran, telah dikemukakan Wardani (1992) bahwa tutorial sebagai ujung tombak pelaksanaan dan pencapaian hasil yang maksimal dari PPD-II PGSD, tampaknya juga masih perlu mendapatkan perhatian dan penanganan. Pelaksanaan tutorial dipandang belum sesuai dengan misi dan tujuannya sebagai *intervensi akademik* terhadap proses belajar mandiri mahasiswa, dalam implementasinya banyak dipengaruhi oleh persepsi yang berbeda tentang tutorial itu sendiri antara mahasiswa dan tutor. Tutor memandang bahwa tugas pokok tutor adalah "membantu kesulitan belajar mahasiswa", tetapi mahasiswa memandang bahwa tutorial identik dengan perkuliahan dengan aktivitas utamanya adalah presentasi materi modul secara jelas dan lengkap.

Ketidaksiapan mahasiswa untuk belajar mandiri seperti dikemukakan sebelumnya tampaknya merupakan faktor determinan mengapa penyelenggaraan tutorial, dan upaya tutor untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang aktif serta interaktif tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pembimbingan PKM, konseptualisasi bahwa PKM sebagai akumulasi kinerja akademik dan profesional para mahasiswa PPD-II PGSD, tampaknya juga tidak luput dari persoalan yang perlu mendapatkan penyempurnaan. Secara prosedural, pelaksanaan PKM pada PPD-II PGSD UT dilaksanakan berdasarkan pola berlapis berulang yang meliputi kegiatan: (1) orientasi PKM; (2) penyusunan rencana pembelajaran; (3) diskusi dan revisi rencana

pembelajaran; (4) pelaksanaan latihan PKM dan (5) diskusi hasil latihan praktik PKM.

Pola pembimbingan PKM diberikan dalam bentuk latihan bertahap dan sistematis dengan *pola berlapis berulang* (Wardani 1992;1997). Artinya, dalam setiap tahapan pembimbingan PKM setelah mahasiswa melakukan pengkajian teori selalu disertai dengan praktik, diskusi tentang hasil praktik, kemudian perbaikan jika diperlukan, seperti terlihat pada gambar berikut.



(Wardani, 1992; 1998)

Gambar 1: Pola Latihan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) dengan *Pola Berlapis-berulang*

Instrumen yang digunakan untuk memonitor dan atau mengevaluasi pelaksanaan PKM, baik dalam tahap latihan (semester II dan IV) maupun dalam tahap ujian (akhir semester IV dan semester V) adalah Alat Penilaian Kemampuan Mengajar Guru I (APKG I) dan APKG II, yang dikembangkan oleh Tim Pengembang APKG FKIP UT untuk digunakan secara khusus bagi PPD-II PGSD (Tim, 1997)

3. Komponen Hasil Program

Prestasi Belajar, seperti digambarkan oleh pencapaian IPK semester I-IV, yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa PPD-II PGSD (86%) hanya mencapai IPK antara 1,60-2,39 dengan kualitas “cukup”, dan hanya (14%) yang mencapai hasil IPK antara 2,40-3,19 dengan kualitas “baik”. Hasil pelaksanaan program tersebut jelas masih jauh dari hasil yang diharapkan.

Prestasi belajar mahasiswa PPD-II PGSD yang kurang mengembirakan tersebut tampaknya merupakan akumulasi dari tidak terpenuhinya “kondisi ideal” dari sejumlah aspek dari komponen-komponen program PPD-II PGSD, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, selanjutnya dapat disimpulkan berikut ini.

1. *implementasi kurikulum* PPD-II PGSD, terutama pada aspek penafsiran dan penjabaran isi kurikulum/GBPP masih dirasakan oleh banyak tutor cukup sulit; demikian pula dengan sumber-sumber pustaka relevan yang dibutuhkan oleh tutor juga masih sulit ditemukan; serta materi kurikuler (modul) masih belum seluruhnya dapat diselesaikan;
2. *minat terhadap profesi guru*, dilihat dari aspek motivasi memilih karier sebagai guru, kemauan, komitmen, dan tanggung jawab mahasiswa di dalam menjalankan tugas-tugas keprofesian guru dapat dikatakan baik; kecuali dalam hal beban tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi mahasiswa masih menjadi kekhawatiran para mahasiswa;
3. *tutor PPD-II PGSD* secara umum sudah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh UT, baik dari aspek jenjang pendidikan sistem integritas, penguasaan materi, latar belakang pendidikan maupun sistem akreditasi tutor; tetapi pada sisi lain juga diketemukan sejumlah tutor yang belum memiliki relevansi antara latar belakang pendidikan bidang studinya dengan mata kuliah yang diampu, dan menjadi kendala bagi unjuk kemampuan tutor, serta untuk kepentingan belajar mahasiswa;
4. *Organisasi dan Mekanisme Pengelolaan Program*, baik secara struktural maupun deskriptif cukup baik dan jelas walaupun di tingkat kecamatan/pokjar masih ditemukan sejumlah kendala yang bersifat teknis operasional, sebagai konsekuensi dari penerapan pengelolaan program yang bersifat

- sentralistis*, munculnya berbagai kasus yang dihadapi oleh mahasiswa kurang mendapatkan penyelesaian yang cepat dan efektif.
5. *Sarana dan Prasarana Belajar* merupakan komponen masukan program pertama yang harus diperbaiki, terutama dalam hal ketersediaan bahan ajar untuk setiap mahasiswa, serta proses distribusi bahan belajar ke pokjar juga dirasakan sangat terlambat, baik oleh tutor, pengelola maupun mahasiswa sehingga sangat berpengaruh bagi kelancaran belajar mandiri mahasiswa, dan efektivitas proses tutotial.
 6. *Tutorial*, masih banyak memerlukan pembenahan dan perbaikan lebih lanjut, baik dalam hal pengaktifan dan pengefektifannya, pemberian dan penyelesaian tugas-tugas kokurikuler di luar jam tutorial; rendahnya motivasi untuk berprestasi di kalangan mahasiswa; minimalnya kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan dan/atau menggunakan alat-alat praktikum IPA (KIT) bagi kepentingan belajarnya; dan rendahnya kemampuan tutor untuk melakukan pembelajaran secara interdisiplines/lintas mata kuliah. Selain itu, ada indikasi kuat bahwa proses tutorial masih didominasi oleh peran tutor dibandingkan dengan mahasiswa, sebagai akibat dari ketidaksiapan mahasiswa untuk melakukan aktivitas belajar mandiri dan sikap kebergantungan yang kuat pada diri mahasiswa terhadap “presentasi materi” oleh tutor menyebabkan proses interaksi dan partisipasi mahasiswa selama tutorial berlangsung masih sulit diterjadikan.
 7. *Manajemen lingkungan belajar*, secara umum telah diselenggarakan dengan baik, melalui berbagai upaya antara lain: *pendisiplinan aktivitas tutorial* mahasiswa; *harmonisasi hubungan interpersonal* dari seluruh unsur pelaksana PPD-II PGSD, yaitu pengelola kabupaten/kecamatan, tutor, dan mahasiswa. Akan tetapi, aspek penataan lingkungan sosial-psikologis pembelajaran masih diperlukan perbaikan, baik pada sisi tutor maupun mahasiswa.
 8. *Pemantapan Kemampuan Mengajar*, secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan *pola berlapis-berulang*. Pelaksanaan PKM dipandang telah mampu meningkatkan dan memantapkan kemampuan mahasiswa, baik dilihat dari aspek: penyusunan rencana pembelajaran, sikap/perilaku dalam mengajar, pemberian tugas-tugas kokurikuler kepada siswa, serta dalam hal penanganan masalah-masalah yang muncul secara insidental selama pembelajaran berlangsung, kecuali pada aspek pengelolaan kelas dan siswa, pelaksanaan tugas-tugas rutin administratif, masih perlu lebih ditingkatkan

dan dimantapkan. Selain itu, masih ditemukan kendala berkaitan dengan implementasi kemampuan-kemampuan khusus (*specific competencies*); optimalisasi proses pembimbingan; dan keberadaan persepsi antarsupervisor tentang penyusunan rumusan TIK/TPK: penyusunan kegiatan belajar-mengajar; dan teknik pengembangan alat evaluasi, serta dipandang masih merupakan persoalan potensial yang perlu diklarifikasi. Di sisi lain, hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan pengalaman dan nuansa ke-SD-an dari para tutor/supervisor; relevansi latar belakang pendidikan supervisor dengan mata pelajaran yang dibimbing; dan besarnya kecenderungan para pembimbing/supervisor memberikan bimbingan PKM hanya atas dasar pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, tidak pada rambu-rambu atau pedoman yang ditetapkan, merupakan sejumlah aspek pelaksanaan program PKM yang perlu diperbaiki pada masa-masa mendatang.

9. *Prestasi belajar* (IPK semester I-IV) mahasiswa PPD-II PGSD secara umum belum mencapai kualitas "baik". Hal tersebut, merupakan akumulasi dari tidak terpenuhinya *kondisi ideal* pada sejumlah aspek dari komponen-komponen program PPD-II PGSD.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Belawati, Tian. 1997. *Understanding and increasing Student Persistence in Distance Education : a case of Indonesia*. Jurnal Pusat Studi Indonesia, 7(1). Diperoleh dari internet, <http://202.159.18.34/jurnal/71.tian.htm>.
- Farisi, Moh. Imam. 1985. *Masalah-masalah Belajar Mandiri Dalam Sistem Belajar Jarak Jauh Pada Mahasiswa P2MGSD Setara D-II di Kabupaten Pamekasan*. Laporan Penelitian tidak diterbitkan: UT.
- Tim. 1997. *Alat Penilaian Kemampuan Mengajar Guru (APKG)*. Jakarta: FKIP-UT.
- Univesitas Terbuka, 1997 a. *Kurikulum (PGSD 01)*. Jakarta: UT.
- Wardani, I.G.A.K. 1992. *Peningkatan Peran Tutor Dalam Pelaksanaan Tutorial*. Buku Materi Pokok Pendukung Penataran Tutor PGSD. Jakarta: P2LPTK.